

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa pendudukan Jepang rakyat Indonesia tidak lebih baik dari masa pendudukan kolonial Belanda. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang dalam menggapai tujuan mereka, salah satunya melakukan propaganda-propaganda yang meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan. Untuk melancarkan propagandanya, pihak Jepang mempekerjakan orang-orang Indonesia seperti guru sekolah, seniman dan tokoh-tokoh sastra, film, drama, wayang dan terutama radio digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan Jepang. Karena sedikitnya radio, maka banyak propaganda radio disiarkan lewat penguas-penguas suara yang di pasang di tempat-tempat umum (Ricklefs, 2008, hlm. 427).

Pendudukan Jepang di Indonesia dilakukan karena mereka membutuhkan sumber-sumber alam yang ada untuk keperluan perang, selain mengeruk sumber daya alam yang ada, bangsa Jepang juga memanfaatkan pemuda-pemuda Indonesia untuk dijadikan serdadu-serdadu Jepang seperti Seinendan, Keibodan dan Heiho. Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang paling berarti, yaitu Peta (Pembela Tanah Air). Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela bangsa Indonesia (Ricklefs, 2008, hlm. 427). Meskipun begitu, organisasi-organisasi buatan Jepang inilah yang menjadi cikal bakal adanya BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang nantinya menjadi prajurit andalan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima sedikitnya menewaskan 78.000 orang, dan disusul pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kembali dijatuhkan di Nagasaki.

“Dua kejadian ini membawa Jepang ke dalam ambang kekalahan dalam Perang Dunia II, namun bagi bangsa Indonesia ini merupakan suatu keadaan yang sangat menguntungkan, pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus, dengan demikian para pemimpin Indonesia dihadapkan pada suatu masalah yang berat. Karena pihak Sekutu tidak

menaklukan kembali Indonesia, maka kini terjadi suatu kekosongan politik” (Ricklefs, 2008, hlm. 443).

Menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dibacakan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Bendera Merah Putih pun berkibar, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, maka lahirlah Republik Indonesia di tengah-tengah kekosongan kekuasaan. Seluruh rakyat Indonesia menyambut kabar gembira ini, karena memang rakyat Indonesia sudah lama mencita-citakan kemerdekaan.

Pasca proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia memulai babak baru dalam perjalanan sejarahnya yaitu menuju era revolusi untuk mewujudkan tercapainya kemerdekaan yang sesungguhnya. Semua usaha yang diperuntukkan mencari jati diri bangsa, persatuan untuk menghadapi kekuatan asing serta menciptakan tatanan sosial yang lebih baik mulai menemui titik terang. Segala hal yang bersifat tekanan dari pihak asing mulai hilang dalam waktu yang sangat cepat, hal ini pula yang mengakibatkan lahirnya bangsa baru yang ingin keluar dari tekanan penjajahan dan menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya.

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh rakyat Indonesia, pasalnya mereka harus menghadapi bangsa asing yang telah kembali dari Perang Dunia II dan ingin menduduki Indonesia untuk yang ketiga kalinya, seperti yang dikatakan Ricklefs :

”iniilah saat ketiga kalinya pihak Belanda bermaksud menaklukan Indonesia. Usaha yang pertama, pada abad XVII dan XVIII, telah berakhir dengan penarikan mundur pihak mereka karena menghadapi perlawanan bangsa Indonesia serta ketidak cakapan mereka sendiri, dan akhirnya dengan dikalahkannya mereka oleh inggris. Usaha yang kedua, yaitu pada abad XIX dan awal abad XX, berakhir dengan dikalahkannya mereka oleh pihak Jepang”(Ricklefs, 2008, hlm 447-448).

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ternyata tidak mengubah kondisi rakyat Indonesia yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya, namun kemudian rakyat Indonesia harus memperjuangkan kemerdekaannya dari bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia, seperti yang dikatakan Ricklefs diatas bahwa Belanda datang untuk ketiga kalinya untuk kembali menaklukan indonesia hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Mansyur (2012, hlm. 143) Benar, Repoeblik Indonesia telah berdiri.

Namun, pendaratan tentara Sekoetoe dan Nica, 29 September 1945, di Tanjung Priok Jakarta....mencoba kembali menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahannya. Pada dasarnya tujuan Belanda datang kembali ke Indonesia yaitu untuk menghancurkan sebuah negara yang telah bekerja sama dengan Jepang dan mereka ingin kembali membangun rezeim kolonial yang menurut mereka telah di bangun sejak 350 tahun yang lalu.

Kedatangan Sekutu ke Indonesia tidak serta-merta datang begitu saja, namun dipengaruhi oleh situasi politik pasca Perang Dunia II. Negara-negara pemenang perang mulai membicarakan mengenai nasib dunia, pembicaran ini salah satunya dilaksanakan melalui Konferensi Postdam di Jerman. “Konfrensi Postdam menghasilkan beberapa kesepakatan dan persetujuan di antara negara-negara anggota pasca perang” (Saleh, 2000, hlm. 18). Salah satu hasil dari Konfrensi tersebut pada tahun 1945, negara-negara pemenang perang (Sekutu) bersepakat wilayah-wilayah koloni yang sempat direbut oleh Jepang akan dikembalikan pada pemilik koloni sebelumnya, bilamana Jepang berhasil ditaklukan dari daerah pendudukannya dalam hal ini termasuk wilayah Indonesia. Maka tidak heran jika mulai bulan juli 1945 sebagian wilayah Indonesia mulai dikuasai kembali oleh tentara Sekutu.

Pada dasarnya, wilayah Indonesia diserahkan kepada *South East Asia Command* (SEAC), Kahin (1995, hlm 179) menyatakan dalam peta politik dunia saat itu wilayah Indonesia sebagian besar diserahkan kepada markas besar komando pasukan Inggris bernama *South East Asia Command* (SEAC) yang berkedudukan di Colombo, ibukota Srilanka. SEAC ini memiliki tugas untuk membawahi wilayah-wilayah yang di tinggalkan oleh Jepang pihak yang kalah dalam Perang Dunia II, tugas pokok SEAC yaitu untuk menjaga keamanan serta memulihkan ketertiban pasca Perang Dunia II yang berada di bawah pimpinan Lord L. Mounbatten. Dilihat dari segi Geografis, wilayah tugas SEAC ini cukup luas mencakup Burma, Muangthai, Indo China dan semenanjung Malaya, maka untuk mempermudah kerja SEAC, wilayah bagian Hindia Belanda diurus oleh satuan khusus yang bernama *Aliied Forces Netherland East Indies* (AFNEI)

Kedatangan AFNEI ke Indonesia disambut baik oleh Rakyat Indonesia, karena pada dasarnya tujuan mereka hanya untuk melucuti tentara Jepang, namun

kondisi tersebut tidak berlangsung lama pasalnya AFNEI tampaknya semakin condong untuk membantu pihak Belanda yang tergabung dalam *Netherland Indische Civil Administration* (NICA) di bawah pimpinan dr. Hubertus Johannes Van Mook dan Charles van der Plas. Kecurigaan rakyat Indonesia terhadap NICA yaitubahwa mereka ingin kembali menegakan kekuasaannya di Indonesia. Kecurigaan terhadap kedatangan NICA ini semakin tampak ketika setiap ada pasukan Sekutu di belakangnya pasti ada mereka yang siap dengan beberapa Batalyon tentaranya.

Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan akibat dari adanya ancaman pihak asing yang ingin kembali menguasai Indonesia, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Sidang PPKI pertama diselenggarakan, yang diantaranya menghasilkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dijabat oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai Wakil Presiden. Guna mengantisipasi datangnya tentara Sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia, dan dalam rangka memperkuat pertahanan dalam negeri karena khawatir akan ada serangan dari Negara asing maka untuk mengatasi hal tersebut dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang di bentuk dan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Agustus 1945.

“Badan Keamanan Rakyat ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Agustus 1945. Badan ini bukan tentara akan tetapi adalah sebuah badan atau Korps Pejuang Bersenjata, dengan tujuan untuk menjamin ketentraman umum. BKR ini merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang pusatnya didirikan pada tanggal 20 Agustus 1945 (DisjarahDAM VI/Siliwangi, 1979: 11).

Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di dalamnya juga memutuskan untuk diadakannya pembentukan suatu badan yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam pidato presiden Soekarno disebutkan bahwa ia meminta pemuda PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda lainnya untuk sementara bekerja dalam BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil jika telah tiba saatnya. Jadi para anggota tentara BKR ini banyak yang berasal dari mantan prajurit hasil pelatihan Jepang meskipun ada juga yang ikut serta untuk bergabung yaitu para pemuda-pemuda yang memang ingin membela tanah airnya.

Pembentukan BKR diikuti pula dengan pembentukan badan-badan yang dibentuk oleh rakyat sendiri seperti Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah,

Sabillilah dan sebagainya. BKR sendiri berada di bawah perintah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Komite Nasional Indonesia Daerah namun keberadaannya mendapat penolakan dari beberapa pemuda yang menginginkan dibentuknya tentara nasional pada akhirnya pemuda-pemuda yang tidak setuju dengan BKR selanjutnya membentuk laskar yang dipersenjatai seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), Pemuda Republik Indonesia, dan sebagainya.

Situasi Indonesia pasca kemerdekaan mengalami ketidakstabilan, dimana pada saat itu Indonesia dituntut membentuk suatu pemerintahan yang baru dengan ancaman bahwa tentara Sekutu akan masuk ke Indonesia, meskipun dengan tujuan awal yaitu untuk membebaskan tahanan perang Sekutu yang ditahan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, akan tetapi ketika militer Indonesia mengetahui bahwa kedatangan Sekutu disertai NICA yang pada dasarnya memiliki kepentingan untuk menjajah kembali. Upaya untuk mengatasi kedatangan Sekutu yang disertai dengan datangnya tentara NICA memiliki kepentingan untuk menjajah kembali Indonesia, pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (Sumarsono, 1993, hlm. 126). Pembentukan TKR tidak lain anggotanya tetap dari BKR dan yang ditunjuk sebagai ketua pimpinan TKR yaitu Supriyadi yang merupakan mantan perwira PETA di Belitar.

Kedatangan Sekutu ke Indonesia, memulai babak baru dalam sejarah catatan sejarah bangsa ini, mulailah beberapa pertempuran terjadi hingga peperangan besar yang terjadi di Sukabumi, seperti yang dikatakan oleh Nasution (1978, hlm 27-28) bahwa pertempuran-pertempuran di Jakarta meluas ke luar kota. Dari Bogor sampai Bandung terjadi pertempuran setiap hari. Tentara Inggris berkali-kali membom dan menembaki dengan senapan mesin kota-kota Bandung, Cianjang, Cianjur, Sukabumi dan Cibadak.

Pertempuran di Sukabumi tidak lepas dari peristiwa penghadangan pengiriman barang-barang logistik untuk memenuhi kebutuhan dan perlengkapan anggota RAPWI di Bandung, pengiriman ini dilakukan dari Jakarta melalui jalur utara, namun dalam perjalanannya menuju Bandung tertahan di Cikampek dikarenakan adanya penghadangan dari pasukan TKR yang kurang terkoordinasi.

Seperti yang dijelaskan Nasution (1993 hlm. 193) bahwa “ketegangan pihak tentara Indonesia dengan Sekutu dimulai sejak insiden Cikampek yang terjadi karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pasukan TKR yang bertugas di daerah Dawuan yaitu Battalyon Priatna dari Resimen V TKR”.

Akibat dari insiden tersebut, maka pengiriman logistik dari Jakarta menuju Bandung, kini harus dikawal oleh pasukan TKR. Saleh (2000, hlm 212) memaparkan bahwa dengan demikian maka sejak tanggal 11 Desember 1945, pengawalan kereta api yang membawa perbekalan dan perlengkapan tentara Sekutu dari Jakarta ke Bandung dilaksanakan oleh para Taruna dari Akademi Militer Tangerang. Untuk selanjutnya pengiriman logistik berjalan lancar tidak menemui kendala apapun seperti sebelumnya, hingga terjadi kontak senjata yang menghilangkan empat nyawa tentara Ghurka. Kurang lebih dalam jangka waktu satu bulan terjadi tiga kali pengiriman barang logistik dari Jakarta menuju Bandung.

Pengiriman logistik dari Jakarta ke Bandung dianggap kurang oleh tentara Sekutu, pasalnya untuk melancarkan operasi di Bandung Sekutu memerlukan peralatan dan persenjataan berat tidak hanya sebatas perbekalan dan perlengkapan saja, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak Sekutu melakukan konvoi-konvoi di jalan raya. Atas pertimbangan keamanan tentara Sekutu lebih cenderung memilih jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung untuk perjalanan Konvoinya (Iskandar 1997, hlm 137-138), di lihat dari segi geografis memang jalan dari jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung lebih landai di banding menggunakan jalur puncak, karena jalurnya banyak terdapat tanjakan yang sangat terjal.

Pengiriman persenjataan alat berat, Kavaleri, Artileri, dan Zeni sudah sangat jelas melanggar perjanjian pengawalan yang pada awalnya hanya untuk mengirimkan logistik yang berupa perbekalan dan perlengkapan saja. Maka Panglima Komandan 1 TKR Jawa Barat Didi Kartasasmita mengeluarkan perintah untuk menyerang konvoi-konvoi di jalan raya dalam wilayah Resimen III TKR Sukabumi. Maka pada tanggal 9-12 Desember terjadilah pertempuran sepanjang jalur Sukabumi-Cianjur.

Pertempuran yang berlangsung mengakibatkan banyak korban jiwa dari pihak Sekutu, TKR maupun warga sipil yang ikut ambil bagian dalam peristiwa penghadangan konvoi Sukabumi-Cianjur. Daerah yang menjadi titik penghadangan yaitu daerah Bojongkokosan meskipun ada beberapa titik terjadi kontak senjata yang menggunakan strategi *hit and run*. Daerah Bojongkokosan dibom habis-habisan oleh angkatan udara Sekutu meskipun dampak dari pengeboman itu merugikan pihak Sekutu karena bom yang dijatuhkan mengenai pasukannya sendiri akibat dari pekatnya kabut yang mengurangi pandangan, namun pengeboman berlanjut hingga menghancurkan pasar Cibadak yang mereka anggap sebagai pertahanan Tentara Keamanan Rakyat, akan tetapi tempat itu hanyalah sebuah pasar tradisional saja.

Peristiwa pertempuran ini tidak hanya berakhir di Sukabumi saja, namun meluas hingga Bandung. Di Bandung sendiri terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini juga tidak lain buntut dari ultimatum yang di keluarkan oleh pihak Sekutu dengan dalih keamanan. Bandung utara harus dikosongkan selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945, namun ultimatum itu tidak pernah dilaksanakan. Batas kota bagian utara dan bagian selatan, adalah rel kereta api yang melintas kota Bandung. Kemudian untuk kedua kalinya, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum (Soekardi, 2005, hlm. 81), ultimatum kali ini sama halnya dengan ultimatum pertama akan tetapi untuk yang kedua ini, supaya TRI mengosongkan seluruh kota Bandung.

Perbedaan pendapat antara petinggi militer yang ingin mempertahankan kota Bandung dan pemerintahan sipil yang pada saat itu dijabat oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir mengintruksikan untuk mentaati aturan guna memperlancar jalannya diplomasi antara pihak Indonesia dan pihak Sekutu. Meninggalkan kota Bandung sangat berat bagi masyarakat, ketidak relaan mereka tampak ketika Kolonel A.H Nasution selaku Wakil Panglima Komandan I Jawa Barat mengeluarkan perintah bumi hangus bangunan penting di Bandung. Eddie Soekardi dalam bukunya mengatakan 4 hal yang di perintahkan oleh Kolonel A.H Nasution yaitu :

1. Semua pegawai dan rakyat harus sudah keluar kota sebelum jam 24.00.
2. Tentara melakukan bumi-hangus terhadap semua bangunan penting

3. Sesudah matahari terbenam, Supaya Bandung Utara di serang oleh pasukan kita dari utara dilakukan pula pembumi-hangusan sedapat mungkin. Begitu pula dari selatan harus ada penyusupan ke utara
4. Pos Komando, saya pindahkan ke Kualalet (Dayeuhkolot) (Soekardi, 2005, hlm. 84).

Seluruh masyarakat serta aparat menyambut baik perintah dari Kolonel A.H Nasution, bahkan keesokan harinya masyarakat kota Bandung sudah berbondong-bondong keluar dari kota Bandung dengan perbekalan seadanya. Pada malam tanggal 24 Maret 1946 tepat pukul 24.00 dinamit pertama yang meledak di Bank Rakyat dan di ikuti dengan peledakan gedung-gedung penting di Bandung serta pembakaran-pembakaran rumah warga oleh warga Bandung sendiri.

Berakhirnya peristiwa Bandung Lautan Api bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, kali ini bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi perang melawan agresi militer Belanda pertama, serta semakin disulitkan dengan adanya Perjanjian *Renville* atau di kenal juga dengan sebutan garis impian Van Mook. Dengan ditandatanganinya Perjanjian *Renville* maka semua pasukan gerilya termasuk pasukan Siliwangi harus meninggalkan daerah gerilya yang sangat luas termasuk kota Bandung, daerah yang semula di perjuangkan pada saat pertempuran Bandung Lautan Api dan perang Agresi Militer Belanda pertama kini harus di serahkan begitu saja, bahkan tidak hanya menyerahkan daerah kekuasaan Siliwangi saja, akan tetapi mereka harus menyerahkan nasib keluarga, istri, dan anak ke pihak kolonial Belanda, seperti yang di tulis oleh DisjarahDAM VI/Siliwangi bahwa :

”Semua tentara Gerilya Indonesia harus ditarik dari kantong-kantong dan penarikan tentara itu berarti bahwa daerah-daerah yang semula di kuasai oleh pasukan-pasukan Siliwangi di Jawa Barat, dengan mentah-mentah diserahkan kepada pihak Belanda yang memang sejak lama sudah mengincar-incarnya. Rakyat yang ada di daerah-daerah itupun “diserahkan pula nasibnya” kepada kekuasaan Pihak Belanda”(DisjarahDAM VI/Siliwangi, 1979: 130-131).

Pada tanggal 1 Februari 1948 pelaksanaan hijrah mulai diberangkatkan, ada yang melalui jalur darat menggunakan kereta Api, ada juga yang menggunakan jalur laut menggunakan kapal barang dari Belanda. Setelah Belanda yakin, seluruh Devisi Siliwangi yang akan di Hijrahkan, sudah lengkap berada di Cirebon, maka diangkutlah ke daerah Republik. Sebagian diangkut dengan kapal Plancius tujuan pelabuhan Rembang, sebagian lagi diangkut dengan kereta api tujuan Gombong,

kemudian diangkut dengan truk hingga ke perbatasan *status quo* (*garis van Mook*) (Soekardi, 2005, hlm. 114).

Keberangkatan pasukan Siliwangi untuk hijrah ke Jawa Tengah tidak lepas dari bantuan pihak Belanda, akan tetapi perlakuan pihak Belanda terhadap pasukan Siliwangi tidaklah wajar, mereka memperlakukan pasukan Siliwangi layaknya tahanan perang padahal mereka dalam misi untuk kepentingan pemerintah Belanda juga, yaitu meninggalkan daerah garis Van Mook. Kondisi kapal yang sangat buruk dan kotor itu mengganggu kesehatan pasukan Siliwangi dan makanan serta tempat istirahat yang diberikan sangat jauh dari kata wajar. Kadang-kadang harus menginap di gudang untuk menunggu pengangkutan lebih lanjut, baik dengan kereta-api maupun kapal laut, sehingga dapatlah dibayangkan betapa prajurit kita itu harus menderita. Makanan dihidangkan di kaleng-kaleng bekas *corned beef* atau sardines. Sungguh suatu perlakuan yang tidak wajar bagi para pejuang gerilya Siliwangi (DisjarahDAM VI/Siliwangi, 1979: 133-134).

Rombongan pertama Divisi Siliwangi, tiba pada tanggal 11 Februari 1948 di Stasiun Tugu Yogyakarta (Soekardi, 2005, hlm. 114), kedatangan pasukan Siliwangi ini disambut oleh Panglima Besar Soedirman, meskipun ada juga rombongan-rombongan yang terlantar di Kebumen, tidak ada satu panitia penyambutan yang hadir di sana hanya kebaikan warga dan penduduk sekitar Kebumen mencoba membantu pasukan Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat, ada yang diberikan makanan seadanya atau sealakadarnya tempat untuk tidur dan beristirahat, hingga pada tanggal 22 Februari 1948 hampir semua pasukan Divisi Siliwangi telah sampai ke tempat hijrah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tidak lama dari peristiwa hijrah Siliwangi, selang beberapa bulan kemudian bangsa Indonesia kini dihadapkan dengan permasalahan baru, yaitu harus melawan bangsa kita sendiri dengan orang-orang yang berbeda paham dan ideologi. Pada tanggal 18 September 1948, PKI/FDR (Front Demokrasi Rakyat), melakukan penkhianatan dan pemberontakan terhadap pemerintah Rakyat Indonesia. Pengkhianatan dan pemberontakan tersebut dikenal sebagai peristiwa Madiun (Soekardi, 2005, hlm. 119). Di balik pemberontakan ini terdapat tokoh mantan Perdana Menteri yaitu Amir Syarifudin yang pada masa kepemimpinannya menyetujui Perjanjian Renville, hal itu pula yang membuat

dirinya jatuh dari kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan kini menjadi oposisi terhadap kabinet yang di pimpin oleh Bung Hatta.

Pemberontakan PKI-Muso yang mencoba melakukan kudeta Republik Indonesia secara besar-besaran dengan gencatan senjata, aksinya mampu diredam khususnya oleh satuan-satuan Divisi Siliwangi yang tersebar di berbagai daerah. Keberhasilan Divisi Siliwangi ini ditandai dengan direbutnya kembali kota Madiun setelah 10 hari pengkudetaan PKI-Muso hingga pemimpin PKI nya pun ditembak mati pada bulan November 1948, seluruh daerah yang dahulunya dikuasai PKI kini telah kembali di bawah kekuasaan Republik Indonesia.

Belum lama putra-putra Siliwangi melepas lelahnya setelah melaksanakan operasi penumpasan terhadap PKI-Muso, pihak Belanda melaksanakan “aksi polisional” mereka yang kedua atau dikenal dengan Agresi Militer Belanda ke II yang berakibat pada jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda pada 19 Desember 1948, penyerangan ini sudah jelas melanggar isi dari Perjanjian Renville yang sebetulnya sudah menguntungkan pihak Belanda. Pasukan-pasukan Republik mengundurkan diri ke pedalaman dan memulai perang gerilya secara besar-besaran di kedua sisi garis van Mook. Pihak tentara mundur dari Yogyakarta pada tanggal 19/20 Desember malam (Ricklefs, 2008, hlm. 484).

Di balik penyerangan Belanda terhadap kota Yogyakarta, keluarlah “PERINTAH SIASAT NO 1” oleh panglima besar Soedirman, surat perintah disambut suka cita oleh pasukan Siliwangi karena mereka akan kembali kedudukannya semula meskipun dengan cara yang berbeda dengan kepergiannya dari Jawa Barat. seperti yang ditulis oleh DisjarahDAM VI/Siliwangi bahwa :

“Maka, tatkala agresi militer Belanda itu dilancarkan pada 19 Desember 1948, pasukan-pasukan Divisi Siliwangi segera bergerak dari kedudukan-kedudukannya masing-masing dan bergerak melaksanakan gerakan militer yang kemudian dikenal dengan nama *Long march Divisi Siliwangi*, suatu perjalanan yang penuh dengan duka-derita, tetapi heroik-patriotik” (DisjarahDAM VI/Siliwangi, 1979: 173).

Agresi Militer Belanda II berujung pada kekecewaan PBB terhadap pihak Belanda, dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag. Dengan demikian, maka peperangan antara Bangsa Indonesia yang membela dan mempertahankan tanah air melawan unsur-unsur/alat-alat penjajahan Belanda berakhir sudah. Konferensi Meja Bundar di Den

Haag ini hasilnya pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), suatu uni yang longgar antara negeri Belanda dan RIS di sepakati dengan Ratu Belanda sebagai pemimpin simbolis. Soekarno akan menjadi Presiden RIS dan Hatta sebagai Perdana Menteri (1949-50) merangkap Wakil Presiden (Ricklefs, 2008, hlm. 487).

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, namun penyerahan ini belum termasuk wilayah Papua. Negara federal ini tidak berumur panjang, karena dalam perjalanannya masih banyak yang kurang suka terhadap RIS, ditambah lagi dengan adanya peristiwa westerling. Penyerahan kedaulatan bukan berarti Divisi Siliwangi yang telah melakukan Long March tidak memiliki tugas apapun. Seperti yang tertulis dalam DisjarahDAM VI/Siliwangibahwa :

“...Darul Islam/S.M Kartosuwiryo masih merajalela! Kemudian meletus teror APRA-Westerling, belum lagi soal “Barisan Sakit Hati”, “Barisan Bambu Runcing” dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut keamanan dalam negeri. Belum lagi ikut sertanya Divisi Siliwangi beserta rekan-rekan Divisi-divisi lainnya yang menanggulangi masalah keamanan dalam negeri baik itu berupa “Pemberontakan Andi Abdul Azis” atau berupa “Pemberontakan RMS, PRRI, Permesta” dan Semacamnya”(DisjarahDAM VI/Siliwangi, 225).

Terjadinya kekisruhan di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 50an membuat para petinggi militer Indonesia mengambil langkah cepat, salah satunya mengirimkan delegasi ke berbagai wilayah di Indonesia guna mempermudah menanggulangi ancaman keamanan dari berbagai pihak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin Divisi Siliwangi tidak lepas dari tugas ini ada beberapa tokoh militer Siliwangi yang memang di kirim ke berbagai wilayah seperti Letnan Kolonel Edie Soekardi yang menjadi Kepala Staf/Wakil Panglima tentara dan teritorium VI, Kalimantan (Seluruh Kalimantan).

Perjalanan Sejarah di Pulau Jawa khususnya di Sukabumi Bandung dan Madiun pada kurun waktu 1945-1949 tidak lepas dari peran berbagai kalangan, baik dari kalangan militer, laskar, warga sipil yang ikut membantu jalannya revolusi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji peranan dari salah satu tokoh militer yang berperan dalam pertempuran di Sukabumi, Bandung, dan pemberantasan PKI-Muso di Magelang serta kiprahnya setelah pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda yaitu Letnan Kolonel Eddie Soekardi yang mungkin berkat jasa beliau dalam upaya mempertahankan

kemerdekaan Indonesia dapat di redam dari gangguan pihak-pihak lain hingga salah satunya menjadi perang revolusi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Kajian sejarah ini pada umumnya sangat kurang peminatnya, bahkan penduduk asli Sukabumi pun tidak tahu banyak tentang sosok Letkol Eddie Soekardi, jangankan untuk mengenali sosok Letkol Eddie Soekardi, mengetahui sejarah yang sangat luarbiasa di Sukabumi pun masih banyak yang belum mengetahuinya, bahkan referensi mengenai Letnan Kolonel Eddie Soekardi, peristiwa sejarah yang terjadi di Sukabumi masih sangat terbatas. Maka dengan demikian penulis tertarik untuk menulis judul Penelitian **“Peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi Pada Masa dan Setelah Revolusi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1958”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan Skripsi ini. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi Pada Masa dan Setelah Revolusi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1958 ?” dengan batasan Masalahnya adalah :

1. Bagaimana awal mula Letnan Kolonel Eddie Soekardi masuk dalam dunia kemiliteran?
2. Bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi dalam Peristiwa Penghadangan Konvoi di Bojongkokosan Sukabumi tahun 1945-1946?
3. Bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi dalam Peristiwa Hijrah Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah tahun 1948?
4. Bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi dalam Peristiwa penumpasan pemberontakan PKI-Muso di daerah Kedu tahun 1948 dan Peristiwa Long March Siliwangi tahun 1948?
5. Bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat pada tahun 1950-1958?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan dan batasan masalah yang telah di bahas pada sub-bab sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana awal mula Letnan Kolonel Eddie Soekardi masuk dalam dunia militer?
2. Menjelaskan bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi dalam Peristiwa Penghadangan Konvoi di Bojongkokosan Sukabumi tahun 1945-1946?
3. Menjelaskan bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi dalam Peristiwa Hijrah Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah tahun 1948?
4. Menjelaskan bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi dalam Peristiwa penumpasan pemberontakan PKI-Muso di daerah Kedu tahun 1948 dan Peristiwa Long March Siliwangi tahun 1948?
5. Menjelaskan bagaimana peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi dalam menjadi prajurit TNI Angkatan Darat pada tahun 1950-1958?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terhadap berbagai pihak yang terkait. Secara khusus penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah yang ada di Sukabumi khususnya pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.
2. Dapat dijadikan dokumen sejarah lokal bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Dapat dijadikan referensi materi pendidikan bagi pembelajaran sejarah tingkat SMP/SMA.
4. Menambah pengetahuan bagi masyarakat Sukabumi bahwa di daerahnya pernah memiliki pemimpin yang mampu membawa pengaruh besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh UPI tahun 2015. Struktur organisasi skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah penulisan yang dimana berkaitan dengan alasan penulis meneliti topik kajian sesuai dengan problematika maupun temuan di lapangan. Setelah latar belakang,

bab ini juga memuat rumusan masalah yang dimana hal ini membantu fokus pada masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada bab ini terdapat tujuan, manfaat, metode dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menjelaskan materi-materi yang dimana memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Materi-materi yang dijelaskan sudah melalui studi literatur yang dilakukan oleh peneliti. Hasil kajian pustaka dipaparkan beberapa konsep yang relevan dengan penulisan. Selanjutnya, agar penelitian lebih terarah teori yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian selanjutnya dibuat kerangka konsep. Mengenai penelitian terdahulu menjadi bagian terakhir dari bab ini dimana penelitian ini berbentuk karya ilmiah yang tentu memiliki hubungan dengan topik penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan. Kegiatan-kegiatan dan cara-cara yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan skripsi pun tertuang pada bab ini.

Bab IV “Peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi Pada Masa dan Setelah Revolusi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1958”. Bab ini menjelaskan seluruh pembahasan penulisan dan diuraikan secara sistematis. Dalam bab ini juga tersaji jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V Simpulan dan Saran dari penulis terkait pertanyaan dan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Dalam simpulan tersebut disertai dengan analisis penulis atas jawaban-jawaban dari permasalahan pada rumusan masalah. Saran dan rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan pun termuat dalam bab ini.